



BAPENDA

2025

LAPORAN

LKjIP



BAPENDA KAB. SERANG



Bapenda
Kabupaten Serang



BAPENDA
KAB. SERANG



@bapenda_Serangkab



<https://bapenda.serangkab.go.id>



Layanan Pengaduan
081119135436

RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Serang dan pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan, memiliki tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Bupati Serang Nomor 85 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bapenda dan Keputusan Kepala Bapenda Kabupaten Serang Nomor 800/Kep.09-Bapenda/2023 tentang Rincian Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Bapenda Kabupaten Serang.

Pada RPJMD Tahun 2021-2026 Bapenda Kabupaten Serang mempunyai satu Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dua Indikator Kinerja Program, yaitu :

1. Tingkat Ketercapaian Target PAD.
2. Persentase Perencanaan dan Penganggaran Pelayanan Administrasi Keuangan, Barang Milik Daerah dan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapenda pada Tahun 2025 adalah Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target sebesar 3,39%. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi capaian hingga Tahun 2025 mencapai 17,29%. IKU ini dihitung dengan membandingkan rasio realisasi kenaikan PAD pada tahun berjalan terhadap PAD pada tahun sebelumnya.

Selanjutnya, berdasarkan Indikator Kinerja Program, pertama, Tingkat Ketercapaian Target PAD Tahun 2025 ditetapkan sebesar 100%, dengan realisasi capaian sebesar 100,91%. Kedua, Persentase Perencanaan dan Penganggaran Pelayanan Administrasi Keuangan, Barang Milik Daerah, dan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 100%, dengan realisasi mencapai 100%.

Selain berpedoman pada RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021–2026, penyusunan laporan kinerja tahun 2025 ini juga mengakomodasi arah kebijakan dan sasaran kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025–2029. Dalam dokumen tersebut, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan

adalah Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah, yang menggambarkan tingkat kemandirian fiskal daerah. Selanjutnya, sebagai pendukung pencapaian IKU dimaksud, ditetapkan 5 (lima) Indikator Kinerja Program, yaitu:

1. Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan Daerah
2. Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan
3. Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)
4. Nilai SAKIP
5. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

IKU Bapenda pada tahun 2025 memiliki indikator Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah dengan target sebesar 31,57% dengan realisasi 31,32%. Adapun untuk indikator Program yaitu Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah dengan target sebesar 31,57%, sedangkan realisasi capaian sampai dengan tahun 2025 tercatat sebesar 31,32%. Indikator ini dihitung dengan membandingkan realisasi PAD terhadap total Pendapatan Daerah pada tahun berjalan, yang mencerminkan tingkat kontribusi PAD dalam struktur pendapatan daerah.

Selanjutnya, indikator Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan pada tahun 2025 ditetapkan dengan target sebesar 100%, dengan realisasi capaian sampai dengan tahun 2025 sebesar 100%. Indikator ini mengukur tingkat pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan daerah yang dilakukan terhadap seluruh objek dan pelaksana pemungutan pendapatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Indikator Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) pada tahun 2025 memiliki target sebesar 91% dengan hasil realisasi sebesar 98%. Indikator ini menggambarkan tingkat implementasi dan pemanfaatan sistem pembayaran non-tunai dalam pengelolaan pendapatan dan belanja daerah sebagai bagian dari upaya peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Untuk indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Bapenda pada tahun 2025 menargetkan capaian sebesar 80,65, dengan realisasi sampai dengan laporan dibuat belum ada, menunggu hasil dari Tim Evaluator SAKIP Inspektorat Kabupaten Serang. Indikator ini mencerminkan kualitas

perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi kinerja yang dilaksanakan oleh Bapenda dalam mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Sementara itu, indikator Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada tahun 2025 ditetapkan dengan target sebesar 90,62 dengan realisasi sampai dengan tahun 2025 mencapai Nilai 89,44. Indikator ini diukur berdasarkan hasil survei terhadap pengguna layanan Bapenda dan digunakan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan dan Belanja Daerah (Konsolidasi) Tahun Anggaran 2025 dari 01 Januari sampai 31 Desember 2025 dengan cetak per tanggal 12 Januari 2026 yang dikeluarkan oleh BPKAD Kabupaten Serang, dapat dilihat rincian target dan realisasi Pendapatan dan Belanja dibawah ini adalah :

A. Pendapatan Daerah

Target PAD tahun 2025 sebesar Rp.1.097.550.142.214,- dengan realisasi sampai dengan tahun 2025 sebesar Rp. 1.107.574.335.688,- atau 100,91%. Capaian tersebut berasal dari Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

1. PAD dari sektor Pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2025 dari target sebesar Rp.725.174.381.504,- dengan realisasi sampai dengan tahun 2025 sebesar Rp.736.179.846.949,- atau 101,52%.
2. PAD dari sektor Retribusi Daerah pada tahun 2025 dari target Rp.252.142.584.022,- dengan realisasi sampai dengan tahun 2025 sebesar Rp.270.387.639.630,- atau sebesar 107,24%.
3. PAD dari sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada tahun 2025 dari target Rp.18.932.083.377,- dengan realisasi sampai dengan tahun 2025 sebesar Rp.18.905.083.376,- atau 99,86%.
4. PAD dari sektor Lain-Lain PAD yang Sah pada tahun 2025 dari target Rp.101.301.093.311,- dengan realisasi sampai dengan tahun 2025 sebesar Rp.82.101.765.733,- atau 81,05%.

Tabel 1. Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025

Uraian	Pagu Anggaran	Realiasi	%
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.097.550.142.214	1.107.574.335.688	100,91
Pajak Daerah	725.174.381.504	736.179.846.949	101,52
Retribusi Daerah	252.142.584.022	270.387.639.630	107,24
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.932.083.377	18.905.083.376	99,86
Lain-lain PAD yang Sah	101.301.093.311	82.101.765.733	81,05

Sumber : LRA Pendapatan dan Belanja Daerah PEMDA (Konsolidasi) Tahun 2025 cetak per 12 Januari 2026

B. Belanja Daerah

Anggaran belanja daerah tahun 2025 sebesar Rp.63.496.162.195,- dengan realisasi sebesar Rp.57.213.484.449,- atau 90,11%. Adapun rincian belanja daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Rincian Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2025

Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	56.056.099.573	50.291.201.125	89,72
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.837.500	47.333.858	98,95
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	49.741.096.931,42	44.720.970.341	89,91
Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.527.887.800	2.350.287.493	92,97
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.439.030.000	1.365.300.000	94,88
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.648.831.997,58	1.392.795.944	84,47
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	651.415.344	414.513.489	63,63
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	7.440.062.622	6.922.283.324	93,04
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	7.440.062.622	6.922.283.324	93,04
BELANJA OPERASI	13.756.582.763,58	12.494.028.680	90,82
BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN	49.739.579.431,42	44.719.455.769	89,91
TOTAL BELANJA DAERAH	63.496.162.195	57.213.484.449	90,11

Sumber : LRA Belanja Bapenda Tahun 2025 cetak per 12 Januari 2026

KATA PENGANTAR

Salah satu tuntutan reformasi yang diharapkan oleh masyarakat adalah terwujudnya reformasi birokrasi melalui penyempurnaan sistem dan prosedur penyelenggaraan pemerintahan. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui penyederhanaan prosedur, penerapan pelayanan satu atap, serta peningkatan kemudahan akses informasi bagi masyarakat. Seluruh langkah ini diarahkan untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima serta membangun organisasi pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Dalam rangka memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dikembangkan media pertanggungjawaban kinerja berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Bapenda Kabupaten Serang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP ini disusun sebagai bentuk kewajiban Bapenda Kabupaten Serang dalam mempertanggungjawabkan capaian kinerja, baik keberhasilan maupun kendala yang dihadapi, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk memenuhi dua kebutuhan utama, yaitu sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada para pemangku kepentingan serta sebagai sarana evaluasi dan analisis capaian kinerja secara berkelanjutan guna perbaikan kinerja di masa mendatang.

LKjIP Bapenda Kabupaten Serang menyajikan capaian kinerja hingga Tahun 2025 beserta analisisnya. Meskipun masih terdapat keterbatasan dalam penyusunannya, laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkesinambungan. Selain itu, LKjIP ini diharapkan dapat mendorong optimalisasi peran Bapenda Kabupaten Serang serta peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja, sekaligus menjadi sarana informasi bagi masyarakat mengenai capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Dengan demikian,

diharapkan terwujud tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, partisipatif, dan akuntabel, serta mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Serang secara keseluruhan.

Serang, 05 Januari 2026

Plt. KEPALA BAPENDA
KABUPATEN SERANG



H. ABER NURHADI, S.Pd, M.Pd

NIP. 19661216 199003 1 005

DAFTAR ISI

	Hal
RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Penjelasan Umum Organisasi.....	2
1.2.1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	3
1.2.2. Aspek Strategis.....	4
1.2.3. Anggaran.....	5
1.3. Dasar Hukum	6
1.4. Sistematika Laporan Kinerja.....	7
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	8
2.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	8
2.2. Rencana Kinerja Tahun 2025.....	11
2.3. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	12
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	19
3.1. Capaian Kinerja	19
3.1.1. Skala Capaian Kinerja.....	19
3.1.2. Membandingkan antara Target dan Realisasi Tahun 2025.....	20
3.1.3. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	23
3.1.4. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	29
3.1.5. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional/ Provinsi/Kabupaten/Kota	31
3.1.6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan	34

3.1.7. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	36
3.1.8. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Perubahan	37
3.2. Realisasi Anggaran.....	46
BAB IV. PENUTUP	48
LAMPIRAN.....	50

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. Rincian Target dan Realisasi PAD Tahun 2025.....	iv
Tabel 2. Rincian Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2025.....	iv
Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2025.....	5
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 – 2026.....	10
Tabel 2.2 Rencana Kinerja Bapenda Kabupaten Serang Tahun 2025	11
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan Bapenda Kabupaten Serang Tahun 2025	13
Tabel 2.4 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Badan Pendapatan Tahun 2025	13
Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja	20
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025.....	20
Tabel 3.3 Rincian Target dan Realisasi PAD Tahun 2025.....	22
Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja.....	24
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2023- 2025	28
Tabel 3.6 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis.....	29
Tabel 3.7 Perbandingan Capaian dengan Standar Kabupaten Serang.....	31
Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi.....	34
Tabel 3.9 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	37
Tabel 3.10 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan.....	38
Tabel 3.11 Capaian Anggaran dan Kegiatan Tahun 2025	46

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Bapenda	4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna, serta mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan SAKIP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa laporan kinerja merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan, khususnya dalam penggunaan anggaran. Unsur utama dalam penyusunan laporan kinerja meliputi pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, serta pengungkapan (*disclosure*) hasil analisis atas capaian kinerja yang diperoleh.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap perangkat daerah sebagai entitas akuntabilitas kinerja diwajibkan untuk menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut, Bapenda Kabupaten Serang berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.

Penyusunan LKjIP Bapenda Kabupaten Serang Tahun 2025 dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Laporan ini bertujuan untuk menyajikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat, sekaligus menjadi sarana evaluasi dan perbaikan kinerja secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kinerja Bapenda Kabupaten Serang pada masa mendatang.

1.2. Penjelasan Umum Organisasi

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Serang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang.

Struktur organisasi Bapenda Kabupaten Serang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Serang Nomor 85 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bapenda Kabupaten Serang, yang memuat kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Bapenda. Adapun pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Bapenda dijabarkan secara rinci melalui Keputusan Kepala Bapenda Kabupaten Serang Nomor 800/Kep.09-Bapenda/2023 tentang Rincian Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Bapenda Kabupaten Serang.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki mandat utama dalam pengelolaan pendapatan daerah, Bapenda Kabupaten Serang berperan strategis dalam upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam pelaksanaan tugasnya, Bapenda didukung oleh struktur organisasi yang terdiri atas sekretariat, bidang-bidang teknis sesuai urusan pendapatan daerah, serta unit pelaksana teknis yang menangani pelayanan operasional. Selain itu, Bapenda memperoleh dukungan anggaran melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Serang setiap tahunnya untuk mendanai pelaksanaan program, kegiatan, dan layanan guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Dengan landasan hukum yang kuat, struktur organisasi yang jelas, pembagian tugas dan fungsi yang terukur, serta dukungan anggaran yang memadai, Bapenda Kabupaten Serang diharapkan mampu menjalankan perannya secara optimal dalam mewujudkan tata kelola pendapatan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Berikut disajikan penjelasan umum organisasi yang berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran Bapenda Kabupaten Serang :

1.2.1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Serang Nomor 85 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bapenda Kabupaten Serang, serta Keputusan Kepala Bapenda Kabupaten Serang Nomor 800/Kep.09-Bapenda/2023 tentang Rincian Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Bapenda Kabupaten Serang, Bapenda Kabupaten Serang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan, khususnya pengelolaan pendapatan daerah. Bapenda mempunyai tugas membantu Bupati Serang dalam menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah.

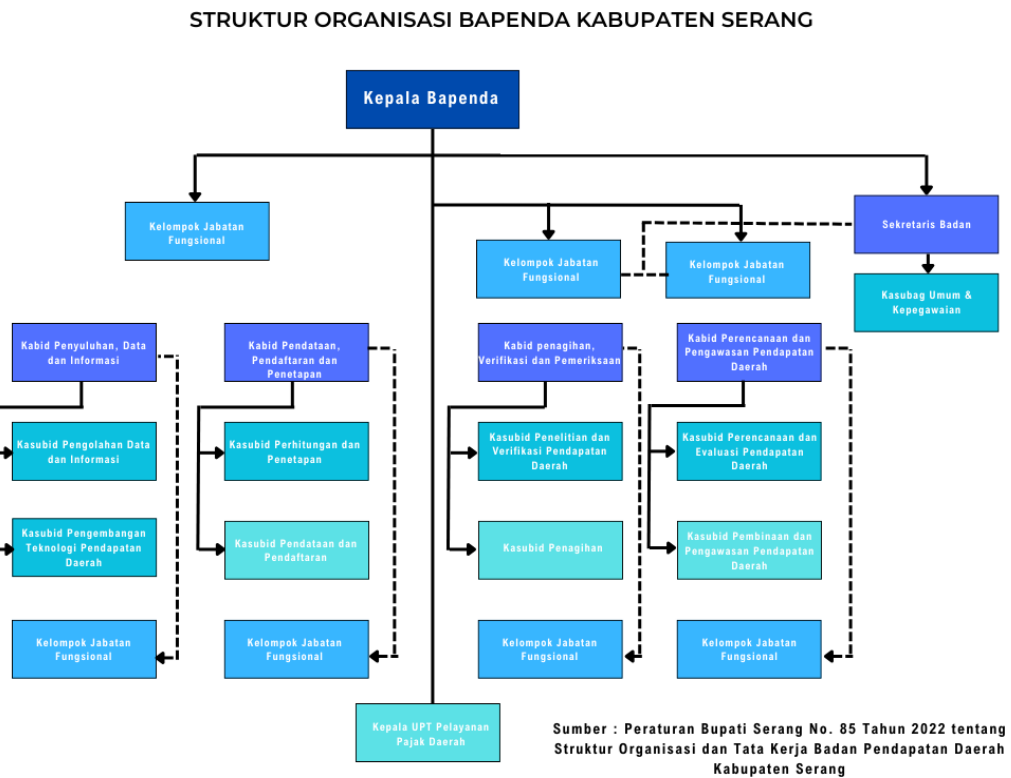
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bapenda Kabupaten Serang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan program dan kegiatan; perencanaan serta pengawasan pendapatan daerah; penyuluhan; pengelolaan data dan informasi; pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan, verifikasi, dan pemeriksaan.
- b. Koordinasi dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam kegiatan perencanaan dan pengawasan pendapatan daerah.
- c. Pelaksanaan administrasi dan teknis operasional terkait pendapatan daerah.
- d. Pengelolaan data, pelaporan, serta evaluasi pelaksanaan kegiatan pendapatan daerah.

Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Serang, Bapenda berperan sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang penggalan potensi pendapatan daerah, khususnya pajak dan retribusi, berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dalam rangka pelaksanaan manajemen keuangan daerah. Bapenda Kabupaten Serang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Serang melalui Sekretaris Daerah.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Bapenda Kabupaten Serang memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Bapenda Kabupaten Serang



1.2.2 Aspek Strategis

Kemandirian daerah dalam pembangunan wilayah menuntut adanya strategi yang tepat dari pemerintah daerah untuk meningkatkan sumber-sumber keuangan, khususnya PAD. Upaya tersebut dilakukan melalui optimalisasi penerimaan dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Arah kebijakan yang ditempuh bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, terintegrasi, dan sinergis, dengan mengedepankan inovasi serta reformasi birokrasi yang transparan dan akuntabel.

Pendapatan daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan perekonomian daerah, menjamin pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar, serta menjaga keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Serang. Dalam konteks tersebut, Bapenda Kabupaten Serang memiliki peran penting dalam mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang maju dan berkelanjutan.

Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan pendapatan daerah, Bapenda Kabupaten Serang berfokus pada penggalian dan optimalisasi

potensi PAD, khususnya melalui peningkatan penerimaan pajak daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah, di samping dana perimbangan dan sumber pendapatan sah lainnya. Peningkatan PAD secara berkelanjutan diharapkan mampu mengurangi ketergantungan fiskal Pemerintah Kabupaten Serang terhadap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Sehubungan dengan hal tersebut, peran strategis Bapenda Kabupaten Serang dalam meningkatkan pendapatan daerah meliputi:

1. Optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah;
2. Optimalisasi intensifikasi pajak dan retribusi daerah;
3. Optimalisasi ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
4. Pemutakhiran dan validasi data potensi pajak dan retribusi daerah;
5. Pengelolaan dan pemeliharaan *data warehouse* pajak dan retribusi daerah;
6. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pengelolaan data;
7. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam pelayanan pajak dan retribusi daerah;
8. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pajak dan retribusi daerah; dan
9. Peningkatan kualitas perencanaan serta evaluasi terhadap penetapan target pendapatan daerah.

1.2.3 Anggaran

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh Bapenda Kabupaten Serang selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah dan fungsinya sebagai pengelola pendapatan yaitu :

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2025

Sumber	Tahun	Jumlah
APBD Perubahan	Tahun 2024	43.147.611.245
APBD Perubahan	Tahun 2025	63.496.162.195

Sumber : LRA Perubahan TW IV Tahun 2024 Audited dan LRA Perubahan TW IV Tahun 2025 cetak per 12 Desember 2025

1.3. Dasar Hukum

Penyusunan LKjIP Bapenda Kabupaten Serang ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 07 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;
13. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2023 tentang Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah;
15. Peraturan Bupati Serang Nomor 85 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan

Tata Kerja Bapenda Kabupaten Serang;

16. Keputusan Kepala Bapenda Kabupaten Serang Nomor 800/Kep.9-Bapenda/2023 tentang Rincian Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Bapenda Kabupaten Serang;

1.4. Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan LKjIP Bapenda Kabupaten Serang Tahun 2025 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menyajikan latar belakang penyusunan LKjIP Tahun 2025, struktur organisasi dan tata kerja, uraian tugas dan fungsi Bapenda Kabupaten Serang, aspek strategis organisasi, anggaran dan sumber dana, dasar hukum serta sistematika laporan kinerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini menguraikan tentang perencanaan kinerja seperti tujuan dan sasaran Bapenda Kabupaten Serang, rencana kerja dan perjanjian kinerja perubahan tahun 2025.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang :

▪ Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

▪ Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan capaian kinerja pada dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Perubahan.
2. Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Bapenda Kabupaten Serang disusun sebagai penjabaran dari visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2021–2026, serta sebagai bagian dari proses kesinambungan perencanaan menuju RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025–2029. Selain itu, perumusan tujuan dan sasaran ini juga mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Bapenda Kabupaten Serang baik tahun 2021-2026 maupun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah. Perumusan tujuan dan sasaran ini dimaksudkan untuk memberikan arah yang jelas dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Bapenda, sekaligus menjadi dasar pengukuran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dalam RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021–2026, arah kebijakan pembangunan daerah menekankan pada peningkatan kemandirian fiskal daerah melalui penguatan sumber-sumber pendapatan daerah, khususnya PAD, guna mendukung pembiayaan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sejalan dengan hal tersebut, tujuan Bapenda Kabupaten Serang adalah meningkatkan kinerja pengelolaan pendapatan daerah dalam rangka memperkuat kemandirian fiskal daerah secara berkelanjutan, transparan, dan akuntabel.

Selanjutnya, RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025–2029 menegaskan keberlanjutan arah kebijakan pembangunan daerah dengan penekanan pada penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta optimalisasi pendapatan daerah melalui inovasi, digitalisasi, dan

peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam konteks ini, Bapenda Kabupaten Serang menyesuaikan tujuan dan sasarannya agar selaras dengan arah kebijakan RPJMD tersebut, khususnya dalam mendukung peningkatan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah dan penguatan kemandirian fiskal.

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, ditetapkan sasaran perangkat daerah yang berorientasi pada meningkatnya pertumbuhan PAD untuk kemandirian fiskal daerah, serta meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga terwujudnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah secara efektif dan berorientasi hasil yang didukung oleh sistem pengelolaan berbasis teknologi informasi, aparatur yang profesional, dan pelayanan publik yang prima.

Pencapaian tujuan dan sasaran Bapenda Kabupaten Serang diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan Perjanjian Kinerja, serta dievaluasi secara berkala melalui pelaporan kinerja. Dengan demikian, tujuan dan sasaran perangkat daerah ini diharapkan mampu menjembatani kesinambungan perencanaan pembangunan daerah antara periode RPJMD 2021–2026 dan RPJMD 2025–2029, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pendapatan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Serang.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah pada Bapenda Kabupaten Serang yang sinergi dengan tujuan dan sasaran pembangunan dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 dan 2025-2029 dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Bapenda Kabupaten Serang Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Tingkat Pertumbuhan PAD	1,12	3,28	3,34	3,39	3,44
			Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	BB	BB	BB	BB	BB

Sumber : Renstra Perubahan 2024 Bapenda 2021-2026

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Bapenda Kabupaten Serang Tahun 2025-2029

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Indikator Outcome	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -				
							2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah					31,57	30,62	30,62	30,62	31,75
			Terwujudnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah	Tingkat Pertumbuhan PAD			8,54	13,50	2,46	2,46	5,90
			Meningkatnya akuntabilitas inastansi perangkat daerah	Nilai SAKIP	80,65	80,68	80,70	80,75	80,78		
					Nilai SKM	90,62	90,62	90,62	90,62	90,62	
			Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	31,57	30,62	30,62	30,62	31,75		
			Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan	100	100	100	100	100		
Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)	91	92	93	94	95					

Sumber : Rancangan Akhir Renstra 2025-2029 Bapenda Kabupaten Serang

Bapenda Kabupaten Serang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 termasuk dalam Misi 5 yaitu “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan publik yang prima didukung kapasitas birokrasi yang berintegritas, kompeten dan profesional” dengan tujuan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik sedangkan dalam RPJMD 2025-2029 termasuk dalam Misi 5 yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, handal dan berorientasi pada pelayanan publik prima” dengan tujuan Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel.

2.2. Rencana Kinerja Tahun 2025

Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam renstra dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2025 termuat didalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025. Berikut Rencana Kinerja Bapenda Tahun 2025 :

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Bapenda Kabupaten Serang Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Satuan	Kegiatan
1	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan & pelayanan publik	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tingkat ketercapaian target PAD	Persentase	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Persentase perencanaan dan penganggaran, pelayanan administrasi keuangan, barang milik daerah dan administrasi umum perangkat daerah	Predikat	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sumber : Renstra Bapenda Tahun 2021-2026							

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Satuan	Kegiatan
2	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Terwujudnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah	Tingkat Pertumbuhan PAD (%)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Nilai	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Nilai SKM	Nilai	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
							Administrasi Umum Perangkat Daerah
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan	%	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan
					Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)	%	
					Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	

Sumber : Renstra Bapenda Tahun 2025-2029

2.3. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Perubahan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas dan diharapkan fokus dalam mengarahkan serta mengelola program atau kegiatan instansi yang lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Perjanjian Kinerja Perubahan ini berupa dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi yang tidak terarah.

Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan oleh Bapenda Kabupaten Serang Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan Bapenda Kabupaten Serang Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	3,39%
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	BB

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Bapenda Kabupaten Serang Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan berikut targetnya pada Bapenda Kabupaten Serang :

Tabel 2.4 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Bapenda Kabupaten Serang Tahun 2025

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		
				K	Satuan	Rp.
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Perencanaan dan Penganggaran Pelayanan Administrasi Keuangan, Barang Milik Daerah, dan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	56.056.099.573
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan	100	%	47.837.500
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	Dokumen	13.828.000
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen	9.720.000

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		
				K	Satuan	Rp.
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	Dokumen	9.720.000
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	14.569.500
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen pelaporan keuangan	100	%	49.741.096.931,42
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73	Orang/ Bulan	49.739.579.431,42
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	Laporan	1.517.500
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran tepat waktu	100	%	2.527.887.800
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	Paket	16.546.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	Paket	578.265.000
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket	243.421.800
		Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	125.155.000
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	18.000.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	Laporan	1.546.500.000

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		
				K	Satuan	Rp.
		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Penyediaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	100	%	1.439.030.000
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	Unit	1.308.000.000
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Unit	131.030.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100	%	1.648.831.997,58
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	10.000.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	Laporan	858.388.005,58
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	Laporan	780.443.992
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100	%	651.415.344
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33	Unit	218.952.700
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80	Unit	56.400.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2	Unit	255.182.644

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		
				K	Satuan	Rp.
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	43	Unit	120.880.000
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Tingkat ketercapaian target pendapatan asli daerah	100	%	7.440.062.622
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan dan Pelaksanaan Pengawasan Pendapatan Daerah	100	%	7.440.062.622
			Persentase pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah yang dilaksanakan secara efektif	100	%	
			Persentase Dokumen Regulasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan tepat waktu	100	%	
			Persentase pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah	100	%	
			Persentase Pelaksanaan Pengolahan Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	100	%	
			Persentase Pengembangan Teknologi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	100	%	
			Persentase Pelaksanaan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	100	%	
			Persentase Pelaksanaan Penilaian PBB P2	100	%	
			Persentase Pelaksanaan Penetapan Wajib Pajak Daerah	100	%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		
				K	Satuan	Rp.
			Persentase Realisasi Penagihan Pajak Daerah	100	%	
			Persentase Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Daerah	100	%	
			Persentase Pelaksanaan Verifikasi Pajak Daerah	100	%	
		Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2	Dokumen	213.212.000
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	20	Dokumen	134.552.000
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4	Laporan	1.324.312.000
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	54	Unit	1.494.051.904
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4	Laporan	812.990.320
		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12	Laporan	828.429.952
		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	25	Objek Pajak	711.539.500
		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	4	Dokumen	659.377.164
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	10.144	Layanan	407.544.768

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		
				K	Satuan	Rp.
		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12	Dokumen	5.840.000
		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	4	Dokumen	357.357.206
		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	4	Dokumen	384.000
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4	Dokumen	329.735.808
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4	Laporan	102.410.000
		Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	2	Laporan	58.326.000
Jumlah						63.496.162.195

Sumber : Dokumen DPPA Bapenda Tahun 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Akuntabilitas Kinerja merupakan kewajiban setiap individu, badan hukum, maupun pimpinan kolektif untuk memberikan pertanggungjawaban secara transparan atas keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak yang berwenang atau pemberi amanah. Bapenda Kabupaten Serang, sebagai perangkat daerah yang mengemban amanah masyarakat dalam pengelolaan pendapatan daerah, melaksanakan kewajiban akuntabilitas tersebut melalui penyusunan LKjIP.

Laporan ini disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP Bapenda Kabupaten Serang memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian target dari setiap indikator tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Bapenda Tahun 2021–2026, Renstra Bapenda Tahun 2025-2029 serta Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja dilaksanakan untuk menilai tingkat keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Pengukuran ini menjadi dasar dalam menilai pencapaian Tujuan dan Sasaran Kinerja Bapenda Kabupaten Serang sampai dengan tahun 2025, serta menjadi bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja,

sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

3.1.2 Membandingkan antara Target dan Realisasi Tahun 2025

Peningkatan kinerja akan berpengaruh pada meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan IKU. Kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU akan menjadi ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Hasil pengukuran atas IKU Bapenda Kabupaten Serang sampai dengan tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama sampai dengan Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Indikator Kinerja Utama				
		Tingkat Pertumbuhan PAD	3,39%	17,29%	509,99%	Sangat Tinggi
		Indikator Kinerja Program				
		Tingkat Ketercapaian Target Pendapatan Asli Daerah	100%	100,91%	100,91%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase Perencanaan dan Penganggaran Pelayanan Administrasi Keuangan, Barang Milik Daerah, dan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Nilai SAKIP	BB	n/a	n/a	-

Sumber : RPJMD 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Terwujudnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah	Indikator Kinerja Utama				
		Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	31,57%	31,32%	99,22%	Sangat Tinggi
		Indikator Kinerja Program				
		Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)	91%	98%	107,69%	Sangat Tinggi
		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	31,57%	31,32%	99,22%	Sangat Tinggi
		Nilai SAKIP	80,65	n/a	n/a	-
		Nilai SKM	90,62	89,44	98,69%	Sangat Tinggi

Sumber : RPJMD 2025-2029

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan 2025 dan LRA Pendapatan dan Belanja Pemda (Konsolidasi) Tahun 2025, Cetak per 12 Januari 2025

Jika dilihat dari tabel diatas, rata-rata persentase capaian sasaran strategis termasuk dalam kategori sangat tinggi.

1. Sasaran Strategis : Meningkatnya PAD, dengan acuan target PAD pada RPJMD Kabupaten Serang 2021-2026 yang mengalami kenaikan setiap tahunnya, maka realisasi PAD juga diharapkan mengalami kenaikan capaian setiap tahunnya. Untuk tahun 2025 ini realisasi tingkat pertumbuhan PAD adalah sebesar 17,29% dari target yang ditetapkan sebesar 3,39% dengan hasil capaian kinerja yaitu 509,99%. Selain memiliki IKU, Bapenda juga memiliki Indikator Kinerja Program, yaitu Tingkat Ketercapaian PAD dengan nilai capaian 100,91% dan masuk dalam kategori Sangat Tinggi dan Persentase Perencanaan dan Penganggaran Pelayanan Administrasi Keuangan, Barang Milik Daerah, dan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan kategori Sangat Tinggi, yaitu dengan capaian 100%.
2. Sasaran Strategis : Terwujudnya Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah, dengan acuan target PAD pada RPJMD

Kabupaten Serang 2025-2029 yang mengalami kenaikan setiap tahunnya, maka realisasi PAD juga diharapkan mengalami kenaikan capaian setiap tahunnya. Untuk tahun 2025 ini realisasi Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah adalah sebesar 31,32% dari target yang ditetapkan sebesar 31,57% dengan hasil capaian kinerja yaitu 99,22%. Selain memiliki IKU, Bapenda juga memiliki Indikator Kinerja Program, yaitu Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan dengan nilai capaian 100% dan masuk dalam kategori Sangat Tinggi, Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah dengan realisasi sebesar 31,32%, Nilai SKM dengan realisasi 89,44% dan semuanya masuk kategori Sangat Tinggi. Adapun untuk realisasi Indeks ETPD yaitu sebesar 98% dan Nilai Sakip menunggu hasil evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Serang.

Tabel 3.3. Rincian Target dan Realisasi PAD sampai dengan Tahun 2025

Uraian	Tahun 2025		%
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
Pajak Daerah	725.174.381.504	736.179.846.949	101,52
Retribusi Daerah	252.142.584.022	270.387.639.630	107,24
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.932.083.377	18.905.083.376	99,86
Lain-Lain PAD yang Sah	101.301.093.311	82.101.765.733	81,05
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.097.550.142.214	1.107.574.335.688	100,91

Sumber : LRA Pendapatan dan Belanja Pemda Tahun 2025 cetak per 12 Januari 2026

- 1) Pajak Daerah dari target Rp.725.174.381.504,- dapat terealisasi sebesar Rp. 736.179.846.949,- atau 101,52% dari target.
 - 2) Retribusi Daerah dari target Rp.252.142.584.022,- dapat terealisasi sebesar Rp.270.387.639.630,- atau 107,24% dari target.
 - 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dari target Rp.18.932.083.377, dapat terealisasi sebesar Rp.18.905.083.376,- atau 99,86% dari target.
 - 4) Lain-Lain PAD yang Sah Rp.101.301.093.311,- dapat terealisasi sebesar Rp.82.101.765.733,- atau 81,05% dari target.
3. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sasaran yang kedua ini memiliki indikator sasaran berdasarkan nilai

SAKIP. Nilai tersebut berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Bapenda tahun 2025 dari Inspektorat Kabupaten Serang selaku evaluator. Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek sampai dengan pencapaian kinerja. Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja. Data dan informasi yang digunakan dalam evaluasi merupakan data dan informasi terakhir yang digunakan dalam implementasi SAKIP saat evaluasi berjalan. Keberhasilan pelaksanaan evaluasi AKIP diharapkan dapat mewujudkan tujuan dari implementasi SAKIP itu sendiri, yaitu meningkatnya kinerja instansi pemerintah/unit kerja serta meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah/unit kerja terhadap kinerjanya. Namun capaian kinerja Tahun 2025 menunggu hasil dari penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Serang pada saat tahun berikutnya. Adapun target pada tahun 2025 ini yaitu dengan Predikat BB.

3.1.3 Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2024 dan tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
					Target	Realisasi	Persentase Capaian
Indikator Kinerja Utama							
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Tingkat Pertumbuhan PAD	8,75%	7,44%	3,39%	17,29%	509,99%
Indikator Kinerja Program							
		Tingkat Ketercapaian Target Pendapatan Asli Daerah	82,80%	80,10%	100%	100,91%	100,91%
		Persentase Perencanaan dan Penganggaran Pelayanan Administrasi	100%	90,53%	100%	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
					Target	Realisasi	Persentase Capaian
		Keuangan, Barang Milik Daerah, dan Administrasi Umum Perangkat Daerah					
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	BB	-	BB	-	-
1	Terwujudnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah	Indikator Kinerja Utama					
		Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	27,05%	27,05%	31,57%	31,32%	99,22%
		Indikator Kinerja Program					
		Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan	100%	100%	100%	100%	100%
		Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)	n/a	99,3%	91%	98%	107,69%
		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	27,05%	27,05%	31,57%	31,32%	99,22%
		Nilai SAKIP	BB	80,60	80,65	n/a	n/a
		Nilai SKM	113	90,61	90,62	89,44	98,69%

Sumber : LKjIP Bapenda Tahun 2023 dan 2024 dan LRA Pendapatan dan belanja (Konsolidasi) Tahun 2025 cetak per 12 Januari 2026

Upaya pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)” menunjukkan hasil yang sangat signifikan. Hal ini tercermin dari indikator kinerja utama berupa Tingkat Pertumbuhan PAD yang pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 3,39%, dengan realisasi hingga tahun 2025 mencapai 17,29%. Dengan capaian tersebut, persentase kinerja mencapai 509,99%, yang mengindikasikan

terlampauinya target secara sangat signifikan. Kondisi ini menunjukkan efektivitas kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah serta meningkatnya kepatuhan wajib pajak daerah.

Pada indikator kinerja program, Tingkat Ketercapaian Target Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 100%, dengan realisasi sebesar 100,91%, sehingga capaian kinerjanya berada pada kategori sangat baik. Meskipun belum sepenuhnya mencapai target, capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan pendapatan daerah telah dilaksanakan secara optimal dan terukur.

Selanjutnya, indikator Persentase Perencanaan dan Penganggaran Pelayanan Administrasi Keuangan, Barang Milik Daerah, dan Administrasi Umum Perangkat Daerah menunjukkan kinerja yang optimal. Pada Tahun 2025, target sebesar 100% berhasil direalisasikan sepenuhnya, dengan capaian kinerja 100%, yang mencerminkan tertibnya proses perencanaan dan penganggaran administrasi perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk sasaran strategis “Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”, indikator Nilai SAKIP menunjukkan konsistensi kinerja dengan predikat BB pada Tahun 2023 dan Tahun 2025. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan manajemen kinerja berbasis hasil telah berjalan secara berkelanjutan, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja ke level yang lebih tinggi.

Dalam rangka mewujudkan sasaran “Terwujudnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah”, indikator kinerja utama Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 31,57%, dengan realisasi 31,32%, sehingga capaian kinerjanya mencapai 99,22%. Capaian ini menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah semakin menguat, meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan.

Pada indikator kinerja program, Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan berhasil direalisasikan 100% sesuai target, yang menunjukkan konsistensi dan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kualitas

tata kelola pendapatan daerah. Selain itu, Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah juga menunjukkan capaian yang sejalan dengan indikator derajat desentralisasi fiskal, dengan realisasi 31,32% atau 99,22% dari target.

Dari aspek transformasi digital, Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) pada Tahun 2024 tercatat realisasi sebesar 99,3%, sementara pada Tahun 2025 sebesar 98%, yang menunjukkan penerapan sistem transaksi non-tunai pemerintah daerah telah berjalan sangat baik dan mendukung transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Sementara itu, indikator Nilai SAKIP pada Tahun 2024 dan 2025 menunjukkan tren peningkatan target secara numerik, dengan nilai 80,60 pada Tahun 2024 dan 80,65 pada Tahun 2025, yang mencerminkan perbaikan berkelanjutan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dari perspektif kualitas pelayanan publik, Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Tahun 2025 mencapai 89,44, dengan persentase capaian 98,69% terhadap target. Capaian ini mengindikasikan bahwa pelayanan di bidang pendapatan daerah dinilai baik oleh masyarakat, meskipun tetap diperlukan peningkatan berkelanjutan guna mencapai tingkat kepuasan yang optimal.

Secara keseluruhan, perbandingan kinerja selama tahun 2023–2025 memperlihatkan bahwa Bapenda Kabupaten Serang terus menunjukkan kinerja yang adaptif dan progresif dalam mengoptimalkan pendapatan daerah. Tren pertumbuhan positif di tahun 2025 menjadi indikator penting bahwa kebijakan penguatan sistem digitalisasi pajak, peningkatan kapasitas SDM, serta perbaikan tata kelola pendapatan telah memberikan hasil nyata terhadap peningkatan kinerja keuangan daerah. Hal ini dapat dilihat dari masing-masing capaian PAD sebagai berikut :

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2023-2025

No	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Pajak Daerah	687.998.284.828	539.805.674.041	78,46	789.769.680.391	573.381.060.252	72,60	725.174.381.504	736.179.846.949	101,52
2	Retribusi Daerah	80.733.720.338	35.321.450.150	43,75	350.923.371.865	336.443.197.168	95,87	252.142.584.022	270.387.639.630	107,24
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.844.221.657	21.844.221.657	100,00	19.600.932.217	19.600.932.217	100,00	18.932.083.377	18.905.083.376	99,86
4	Lain-Lain PAD yang Sah	270.982.670.942	281.961.344.093	104,05	18.648.385.082	14.889.752.988	79,84	101.301.093.311	82.101.765.733	81,05
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.061.558.897.765	878.932.689.941	82,80	1.178.942.369.555	944.314.942.625	80,10	1.097.550.142.214	1.107.574.335.688	100,91

Sumber : LRA Audited Tahun 2023-2024 dan LRA Pendapatan dan Belanja PEMDA Tahun 2025 (Konsolidasi) cetak per tanggal 12 Januari 2026

Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama Tahun 2023–2025 menunjukkan tren perbaikan kinerja yang signifikan, khususnya pada Tahun 2025. Pada Tahun 2023, PAD direalisasikan sebesar Rp.878.932.689.941,- atau 82,80% dari target, dengan kontribusi terbesar berasal dari Pajak Daerah meskipun capaian retribusi masih relatif rendah. Tahun 2024 menunjukkan penurunan persentase capaian PAD menjadi 80,10%, yang dipengaruhi oleh belum optimalnya realisasi Pajak Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah. Namun demikian, pada Tahun 2025 kinerja PAD mengalami peningkatan yang sangat baik dengan realisasi sebesar Rp. 1.107.574.335.688.- atau 100,91% dari target, didukung oleh capaian Pajak Daerah yang melampaui target sebesar 101,52% dan Retribusi Daerah sebesar 107,24% serta kinerja stabil pada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang hampir mencapai 100%, dan Lain-Lain PAD yang Sah masih memerlukan penguatan untuk mencapai target secara optimal dengan realisasi sebesar 81,05%.

3.1.4 Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen Rencana Strategis Perubahan Bapenda Periode 2021-2026 dan Renstra 2025-2029 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.6 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Indikator Kinerja Utama			
		Tingkat Pertumbuhan PAD	17,29%	3,44%	502,61%
		Indikator Kinerja Program			
		Tingkat Ketercapaian Target Pendapatan Asli Daerah	100,91%	100%	100,91%
		Persentase Perencanaan dan Penganggaran Pelayanan Administrasi Keuangan, Barang Milik Daerah, dan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	n/a	BB	n/a
<i>RPJMD 2021-2026</i>					
1	Terwujudnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah	Indikator Kinerja Utama			
		Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	31,32%	31,75%	98,64%
		Indikator Kinerja Program			
		Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan	100%	100%	100%
		Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)	98%	95%	103,15%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	31,32%	31,75%	98,64%
		Nilai SAKIP	n/a	80,78	n/a
		Nilai SKM	89,44	90,62	98,69%
<i>RPJMD 2025-2029</i>					

Sumber : Renstra Bapenda 2021-2026, Renstra 2025-2029 dan Dokumen Evaluasi Internal TW IV Tahun 2025

Berdasarkan capaian kinerja sampai dengan tahun 2025, sasaran strategis “Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah” menunjukkan hasil yang sangat baik. Indikator kinerja utama berupa Tingkat Pertumbuhan PAD terealisasi sebesar 17,29%, jauh melampaui target akhir Rencana Strategis sebesar 3,44%, dengan tingkat kemajuan mencapai 502,61%. Capaian ini mencerminkan keberhasilan kebijakan pengelolaan pendapatan daerah serta efektivitas upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD yang dilaksanakan secara konsisten.

Pada indikator kinerja program, Tingkat Ketercapaian Pendapatan Asli Daerah mencapai 100,91% dari target 100%, yang menunjukkan bahwa pengelolaan pendapatan daerah telah berjalan optimal meskipun masih terdapat selisih kecil terhadap target yang ditetapkan. Sementara itu, indikator Persentase Perencanaan dan Penganggaran Pelayanan Administrasi Keuangan, Barang Milik Daerah, dan Administrasi Umum Perangkat Daerah berhasil direalisasikan sepenuhnya sebesar 100%, yang menandakan tertibnya proses perencanaan dan penganggaran serta kuatnya dukungan tata kelola administrasi perangkat daerah.

Untuk sasaran strategis “Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”, indikator Nilai SAKIP belum dapat diukur secara kuantitatif pada periode pelaporan ini, namun target akhir Rencana Strategis ditetapkan pada predikat BB, yang menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga dan meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja.

Selanjutnya, dalam mendukung sasaran RPJMD 2021–2026 serta kesinambungannya dengan RPJMD 2025–2029, sasaran “Terwujudnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah” menunjukkan capaian yang cukup optimal. Indikator Rasio Derajat Desentralisasi

Fiskal Daerah terealisasi sebesar 31,32% dari target 31,75%, dengan tingkat kemajuan 99,22%, yang sejalan dengan indikator Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah dengan capaian yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah terus menguat.

Pada indikator kinerja program pendukung, Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan telah dilaksanakan secara menyeluruh dengan capaian 100%, yang mencerminkan konsistensi pengawasan dan pembinaan dalam pengelolaan pendapatan daerah. Sementara itu, penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) ditargetkan sebesar 91% dengan realisasi 98%, sebagai bagian dari penguatan tata kelola keuangan daerah berbasis digital. Dari sisi kualitas pelayanan, Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) mencapai 89,44 atau 98,69% dari target, yang menunjukkan bahwa pelayanan di bidang pendapatan daerah berada pada kategori baik dan terus mengalami peningkatan secara berkelanjutan.

3.1.5 Membandingkan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional/provinsi/kabupaten/kota diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.7 Perbandingan Capaian dengan Standar Kabupaten Serang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Standar Kabupaten Tahun 2025	% Capaian
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Indikator Kinerja Utama			
		Tingkat Pertumbuhan PAD	17,29%	3,39%	509,99%
		Indikator Kinerja Program			
		Tingkat Ketercapaian Target Pendapatan Asli Daerah	100,91%	100%	100,91%
		Persentase Perencanaan dan Penganggaran Pelayanan Administrasi Keuangan, Barang Milik Daerah, dan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Standar Kabupaten Tahun 2025	% Capaian
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	n/a	BB	n/a
RPJMD 2021-2026					
1	Terwujudnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah	Indikator Kinerja Utama			
		Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	31,32%	31,57%	99,22%
		Indikator Kinerja Program			
		Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan	100%	100%	100%
		Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)	98%	91%	107,69%
		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	31,32%	31,57%	99,22%
		Nilai SAKIP	n/a	80,60	n/a
		Nilai SKM	89,44	90,62	98,69%
RPJMD 2025-2029					

Sumber : Renstra Bapenda 2021-2026, Renstra 2025-2029 dan Dokumen Evaluasi Internal TW IV Tahun 2025

Berdasarkan capaian kinerja sampai dengan tahun 2025, sasaran strategis “Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah” menunjukkan kinerja yang sangat baik. Indikator kinerja utama berupa Tingkat Pertumbuhan PAD terealisasi sebesar 17,29%, jauh melampaui standar kabupaten Tahun 2025 sebesar 3,39%, dengan persentase capaian mencapai 509,99%. Capaian ini mencerminkan keberhasilan pelaksanaan kebijakan pengelolaan pendapatan daerah serta efektivitas upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD yang dilakukan secara berkelanjutan.

Pada indikator kinerja program, Tingkat Ketercapaian Pendapatan Asli Daerah mencapai 100,91% dari standar kabupaten sebesar 100%, yang menunjukkan bahwa realisasi pendapatan daerah telah melampaui target yang ditetapkan dan berada pada kategori sangat baik. Sementara itu, indikator Persentase Perencanaan dan

Penganggaran Pelayanan Administrasi Keuangan, Barang Milik Daerah, dan Administrasi Umum Perangkat Daerah berhasil direalisasikan sepenuhnya dengan capaian 100%, sesuai dengan standar kabupaten, yang mencerminkan tertibnya proses perencanaan dan penganggaran serta kuatnya tata kelola administrasi perangkat daerah.

Untuk sasaran strategis “Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”, indikator Nilai SAKIP belum dapat diukur secara kuantitatif pada periode pelaporan ini, namun standar kabupaten Tahun 2025 ditetapkan pada predikat BB, yang menunjukkan arah kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga dan meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja.

Selanjutnya, dalam mendukung sasaran RPJMD 2021–2026 dan kesinambungannya dengan RPJMD 2025–2029, sasaran “Terwujudnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah” menunjukkan capaian yang cukup optimal. Indikator kinerja utama Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah terealisasi sebesar 31,32% dari standar kabupaten 31,57%, dengan persentase capaian 99,22%, yang sejalan dengan indikator Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah dengan capaian yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah semakin menguat, meskipun masih terdapat selisih kecil terhadap standar yang ditetapkan.

Pada indikator kinerja program pendukung, Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan telah dilaksanakan secara menyeluruh dengan capaian 100%, sesuai standar kabupaten, yang mencerminkan konsistensi pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan pendapatan daerah. Sementara itu, Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) ditetapkan pada standar kabupaten sebesar 91 sebagai bagian dari penguatan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah dimana realisasinya sebesar 98%. Dari sisi kualitas pelayanan publik, Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) mencapai 89,44 atau 98,69% dari standar kabupaten, yang menunjukkan bahwa pelayanan di bidang pendapatan daerah berada pada kategori baik dan terus mengalami peningkatan secara berkelanjutan.

3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Tingkat Pertumbuhan PAD	3,39%	17,29%	509,99%	kolaborasi kuat dengan desa/kecamatan, upaya intensif pemutakhiran data pajak (NJOP), peningkatan layanan (mobil keliling) dan Sanjung, program keringanan sanksi administrasi, sinergi dengan Kejaksaan dan KSOP Kelas I Banten, serta partisipasi aktif wajib pajak. Selain itu, peningkatan pendapatan juga didorong penambahan wajib pajak baru seperti tempat hiburan olahraga dan pembangunan infrastruktur yang meningkatkan nilai pajak.	
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	BB	-	-	-	
1	Terwujudnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk meningkatkan kemandirian	Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	31,57%	31,32%	99,22%		
		Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan	100%	100%	100%		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
		Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)	91%	98%	107,69%		
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80.65	n/a	n/a		
		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	31.57%	31,32%	99,22%		
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	90.62	89,44	98,69%		

3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Suatu organisasi dapat dikatakan tumbuh dan berkembang apabila dalam organisasi tersebut menunjukkan tanda-tanda, antara lain :

- a. Organisasi makin mampu meningkatkan produktivitas; dan
- b. Semakin terlihat adanya kinerja organisasi yang makin efisien.

Demikian halnya dengan Bapenda Kabupaten Serang yang juga merupakan suatu organisasi perangkat daerah, tentu saja diharapkan dapat tumbuh dan berkembang, utamanya dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Dan Untuk mencapai sasaran organisasi secara optimal perlu dilakukan upaya yang sungguh-sungguh serta terus-menerus dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya dan dana yang tersedia dalam bentuk perencanaan program kegiatan yang baik. Berikut Kami sajikan tabel analisis efisiensi penggunaan sumber daya :

Tabel 3.9 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	*Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Tingkat Ketercapaian Target Pendapatan Asli Daerah	100,91%	93,04%%	7,87%
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase Perencanaan dan Penganggaran Pelayanan Administrasi Keuangan, Barang Milik Daerah, dan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	89,72%	10,28%

**Tingkat Efisiensi : % Capaian Kinerja dikurangi % Penyerapan Anggaran*

Capaian sasaran strategis “Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah” menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan tingkat ketercapaian target Pendapatan Asli Daerah sebesar 100,91%. Capaian kinerja tersebut didukung oleh penyerapan anggaran sebesar 93,04%, sehingga menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 7,87%. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran dalam mendukung pencapaian target PAD telah dilaksanakan secara relatif efisien, dengan output kinerja yang hampir optimal dibandingkan dengan sumber daya anggaran yang digunakan.

Sementara itu, pada sasaran strategis “Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”, indikator Persentase Perencanaan dan Penganggaran Pelayanan Administrasi Keuangan, Barang Milik Daerah, dan Administrasi Umum Perangkat Daerah mencapai 100%, dengan penyerapan anggaran sebesar 89,72%. Kondisi ini menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 10,28%, yang mencerminkan bahwa seluruh target kinerja dapat dicapai secara optimal dengan pemanfaatan anggaran yang lebih hemat, sekaligus menunjukkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan administrasi pemerintahan daerah.

3.1.8 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel berikut ini :

Tabel 3.10 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan Tahun 2025

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Perencanaan dan Penganggaran Pelayanan Administrasi Keuangan, Barang Milik Daerah, dan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan	100%		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian sasaran Strategis ke- 2
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian sasaran Strategis ke- 2
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian sasaran Strategis ke- 2
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian sasaran Strategis ke- 2
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen pelaporan keuangan	100%		

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73 Orang/Bulan	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke- 2 dan Stimulus untuk Pencapaian sasaran Strategis ke-1
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian sasaran Strategis ke- 2
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran tepat waktu	100%		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Tidak Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Pemenuhan Kebutuhan Barang dan Jasa sebagai Sarana untuk Mendukung Pencapaian Sasaran
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Pemenuhan Kebutuhan Barang dan Jasa sebagai Sarana untuk Mendukung Pencapaian Sasaran

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
		Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Pemenuhan Kebutuhan Barang dan Jasa sebagai Sarana untuk Mendukung Pencapaian Sasaran
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 Dokumen	Tidak Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Pemenuhan Kebutuhan Barang dan Jasa sebagai Sarana untuk Mendukung Pencapaian Sasaran
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	100%		
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Unit	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	65 Unit	Tidak Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke- 2 dan Stimulus untuk Pencapaian sasaran Strategis ke-1
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%		

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Tidak Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Pemenuhan Kebutuhan Barang dan Jasa sebagai Sarana untuk Mendukung Pencapaian Sasaran
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Tidak Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	Tidak Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27 Unit	Tidak Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	Tidak Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21 Unit	Tidak Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Tingkat ketercapaian target pendapatan asli daerah	97,02%		
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Capaian Dokumen Target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tersedia secara tepat waktu	94%		
			Capaian Dokumen Regulasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan tepat waktu	170%		
			Capaian pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah yang dilaksanakan secara efektif	100%		
			Capaian pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah	100%		
			Capaian Pelaksanaan Pengolahan Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	100%		
			Capaian Pengembangan Teknologi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	65%		
			Capaian Pelaksanaan Kegiatan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	100%		

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
			Capaian Pelaksanaan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	100%		
			Capaian Pelaksanaan Penilaian PBB P2	100%		
			Capaian Pelaksanaan Penetapan Wajib Pajak Daerah	100%		
			Capaian Realisasi Penagihan Pajak Daerah	100%		
			Capaian Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Daerah	100%		
			Capaian Pelaksanaan Verifikasi Pajak Daerah	100%		
		Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-1
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	31 Dokumen	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-1
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-1
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	54 Unit	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-1

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-1
		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-1
		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	25 Objek Pajak	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-1
		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	4 Dokumen	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-1
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	15.579 Layanan	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-1
		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-1
		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	4 Dokumen	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-1
		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	0 Dokumen	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-1

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4 Dokumen	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-1
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-1
		Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	2 Laporan	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	

3.2 Realisasi Anggaran

Untuk realisasi anggaran merupakan serapan anggaran pelaksanaan kegiatan yang digunakan dalam pencapaian sasaran sampai dengan tahun 2025 serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan. Dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.11 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Anggaran (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	56.056.099.573	50.291.201.125	89,72
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.837.500	47.333.858	98,95
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	49.741.096.931,42	44.720.970.341	89,91
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.527.887.800	2.350.287.493	92,97
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.439.030.000	1.365.300.000	94,88
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.648.831.997,58	1.392.795.944	84,47
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	651.415.344	414.513.489	63,63
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	7.440.062.622	6.922.283.324	93,04
2.1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	7.440.062.622	6.922.283.324	93,04
JUMLAH		63.496.162.195	57.213.484.449	90,11

Sumber : LRA Belanja Bapenda s.d TW IV 2025 cetak per tanggal 06 Januari 2026

Realisasi anggaran Tahun 2025 menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan yang baik. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dialokasikan anggaran sebesar Rp.56.056.099.573,- dengan realisasi Rp.50.291.201.125,- atau 89,72%. Capaian ini didukung oleh kinerja subkegiatan yang relatif tinggi, antara lain Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan realisasi 98,95%, Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar 92,97%, serta Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar 94,88%. Namun demikian, masih terdapat subkegiatan dengan capaian relatif rendah, khususnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terealisasi 63,63%, serta Penyediaan

Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar 84,47%, yang dipengaruhi oleh efisiensi belanja dan penyesuaian kebutuhan pelaksanaan kegiatan.

Sementara itu, Program Pengelolaan Pendapatan Daerah memiliki pagu anggaran sebesar Rp.7.440.062.622,- dengan realisasi Rp.6.922.283.324,- atau 93,04%, yang seluruhnya berasal dari Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Tingginya tingkat realisasi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pendukung pengelolaan pendapatan daerah berjalan efektif dan tepat sasaran. Secara keseluruhan, total anggaran sebesar Rp.63.496.162.195,- terealisasi Rp.57.213.484.449,- atau 90,11%, yang mencerminkan pengelolaan anggaran yang cukup optimal, efisien, serta mendukung pencapaian sasaran dan kinerja Badan Pendapatan Daerah.

BAB IV PENUTUP

LKjIP Bapenda Kabupaten Serang tahun 2025 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*). Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Bapenda Kabupaten Serang tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Bapenda Kabupaten Serang dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran dalam setiap triwulannya, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Secara umum, capaian kinerja yang diperoleh menunjukkan hasil yang positif, baik dari aspek peningkatan Pendapatan Asli Daerah maupun dari sisi tata kelola administrasi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berbagai indikator kinerja strategis dan program telah menunjukkan capaian yang mendekati bahkan melampaui target yang ditetapkan, yang mencerminkan komitmen dan kinerja seluruh jajaran dalam melaksanakan kebijakan pendapatan daerah secara optimal.

Namun demikian, laporan ini juga mengidentifikasi beberapa aspek yang masih memerlukan perhatian dan perbaikan ke depan, baik dalam hal optimalisasi potensi pendapatan, peningkatan kualitas pelayanan, maupun penguatan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Hasil evaluasi kinerja ini menjadi dasar penting dalam merumuskan langkah-langkah perbaikan dan strategi tindak lanjut pada periode perencanaan berikutnya.

Ke depan, Badan Pendapatan Daerah berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja melalui penguatan inovasi, pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan. Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan kemandirian fiskal daerah secara berkelanjutan sejalan dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Serang.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah. Semoga laporan kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi, pembelajaran,

dan acuan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Serang, 05 Januari 2026

Plt. KEPALA BAPENDA
KABUPATEN SERANG



H. ABER NURHADI, S.Pd, M.Pd

NIP. 19661216 199003 1 005

